



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI UTARA Sub Bagian Humas dan TU Kepala Perwakilan

Manado Post (Hal 13)

Senin, 8 Agustus 2022

Tamuntuan Serahkan LHP BPK Banpol



GUYUR: Penjabat Bupati dr Rinny saat menyerahkan LHP BPK-RI atas LPJ penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan Parpol di Kepulauan Sangihe, Jumat (5/8) pekan lalu di Ruang Serba Guna Rumah Jabatan Bupati.

SANGIHE—Penjabat Bupati Kepulauan Sangihe dr Rinny Silangen Tamuntuan menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik (Parpol) di Kepulauan Sangihe, Jumat (5/8) pekan lalu di Ruang Serba Guna Rumah Jabatan Bupati.

Parpol yang menerima LHP BPK-RI masing-masing, PDIP, Golkar, Demokrat, Nasdem, Perindro dan Hanura, termasuk pimpinan

DPRD Sangihe yang diwakili Wakil Ketua Dewan Ferdy Sondakh dan Kepala Inspektorat Nusrianto Pande juga turut menerima sebagai tembusan dari BPK-RI.

Dalam sambutannya, Penjabat Bupati memberikan apresiasi kepada pimpinan 6 parpol yang hadir bersama pengurus sekaligus mengharapkan tetap terjalin sinergitas dalam melaksanakan tugas pembangunan pemerintahan dan kemasyarakatan. "Lewat dana bantuan diharapkan parpol dapat memanfaatkan sebaik mungkin serta

untuk laporan pertanggung jawabannya dapat dimasukkan sesuai dengan ketentuan dan waktu yang ditetapkan," ungkap Tamuntuan.

Diketahui, LHP Bantuan Parpol ini sebelumnya telah diserahkan BPK-RI Perwakilan Sulawesi Utara kepada Penjabat Bupati Sangihe di Kantor BPK-RI di Manado pada Rabu 27 Juli 2022 yang selanjutnya hari ini dilanjutkan diserahkan kepada masing-masing partai.

Sementara itu Kepala Badan Kesbangpol Sangihe Franky Nantingkaseh disela-sela acara mengatakan, LHP BPK-RI

nantinya menjadi dasar untuk pembayaran dana bantuan politik tahun anggaran 2022. "Jadi ini akan berproses dan nanti dari Kesbangpol akan menyurat ke pimpinan parpol untuk menyiapkan berbagai administrasi terkait dengan persiapan pencairan, yang tentunya didahului dengan proposal permohonan pencairan oleh pimpinan parpol," urai Franky.

Turut hadir Kepala Badan Keuangan Sangihe, Jansje Budiman serta Komisioner KPUD Sangihe yang juga dalam kapasitas Tim Verifikator dana parpol. (wan/ewa)